



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN,
BPJS KETENAGAKERJAAN, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala Badan POM RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 25 Agustus 2014
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2013.
2. Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L 2015)
Ketua Rapat : Ir. Soepriyatno/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir : A. Anggota Komisi IX DPR RI
orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI
B. Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan POM RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM RI, dan dibuka pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menerima usulan Pagu Anggaran BPOM RI Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.207.550.930.000 (Satu Trilyun Dua Ratus Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan usulan kebutuhan tambahan anggaran BPOM RI Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp390.014.985.720 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Milyar Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) serta selanjutnya akan melakukan pendalaman dengan para eselon I.
2. Komisi IX DPR RI memberikan catatan terhadap kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) pada tahun 2013 sebagai berikut:
 - Realisasi anggaran BPOM Tahun 2013 belum optimal hanya sebesar 85.4%
 - BPOM RI hanya mendapatkan hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pengawas Keuangan RI (BPK RI).

Oleh karena itu Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada Tahun Anggaran 2015 dan tahun-tahun anggaran seterusnya.

3. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis dari BPOM RI atas pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, Senin 25 Agustus 2014 dan diserahkan sebelum pendalaman pembahasan usulan Pagu Anggaran dengan para eselon I.

Rapat diakhiri pukul 12.20 WIB

KETUA RAPAT,



Ir. SOEPRİYATNO